

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN
TRANSFER TERHADAP BELANJA DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG**

***ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL ORIGINAL REVENUE AND
TRANSFER REVENUE ON REGIONAL EXPENDITURE AND FINANCIAL
PERFORMANCE OF REGIONAL GOVERNMENT IN REGENCY/CITY
IN LAMPUNG PROVINCE***

Dila Anjelika¹, Ginta Ginting², Ana Sriekaningsih³

Program Magister Manajemen, Universitas Terbuka

E-mail: dilaanjelikaliu@gmail.com¹, ginta@ecampus.ut.ac.id², an_juf19@yahoo.co.id³

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of Local Own-Source Revenue and Transfer Revenue on Regional Expenditure and Regional Financial Performance in the regencies and cities of Lampung Province. The population of this study includes all regencies and cities in Lampung Province, while the sample was determined using a purposive sampling technique. The data employed are quantitative panel data obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance, consisting of the realized Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) from 2014 to 2023. The analytical method used is panel data regression analysis, conducted with the EViews version 13 statistical software. The findings reveal that Local Own-Source Revenue and Transfer Revenue have a positive and significant effect on Regional Expenditure. Regional Expenditure also has a positive and significant effect on Regional Financial Performance. However, Local Own-Source Revenue and Transfer Revenue do not have a significant direct effect on Regional Financial Performance. Nevertheless, both variables exert a positive and significant influence on Regional Financial Performance through Regional Expenditure.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Transfer Revenue, Regional Expenditure, Regional Financial Performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data yang digunakan berjenis data kuantitatif berbentuk data panel yang diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan berupa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai dari tahun 2014-2023. Metode analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi data panel menggunakan aplikasi statistik EViews versi 13. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Namun, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Melalui Belanja Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai suatu proses di mana pemerintah pusat mengalihkan sebagian dana ke pemerintah daerah dengan tujuan utama mengurangi ketidakseimbangan fiskal, baik dari segi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah maupun dari segi horizontal antara daerah-daerah itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan ekonomi kepada masyarakat (Christia, 2019). Di Indonesia, penerapan desentralisasi fiskal, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah mengubah dasar interaksi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini memiliki sumber pendanaan untuk mengelola operasi sehari-hari mereka, termasuk meningkatkan kinerjanya, dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan potensi lokal mereka serta dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat maupun antar daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berkaitan dengan itu, dua sumber utama penerimaan daerah yang menjadi tulang punggung pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokalnya, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam konteks fiskal federalism yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972), PAD berperan penting sebagai sumber

pendapatan yang memungkinkan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan hal ini dipertegas oleh beberapa penelitian Affifah dkk (2021) serta Wahyuni (2018) bahwa tingginya PAD menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa serta transfer lainnya, menjadi instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah. Dalam konteks teori *Fiscal Federalism*, dana transfer berfungsi untuk menciptakan pemerataan kemampuan fiskal agar daerah dengan sumber daya terbatas tetap mampu memberikan pelayanan publik secara memadai.

Belanja daerah merupakan wujud nyata dari fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan teori belanja pembangunan (Musgrave & Musgrave, 1989), alokasi anggaran publik yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor prioritas. Hal ini dipertegas oleh penelitian Wiranata (2025) yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara alokasi belanja pembangunan dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan, seperti konstruksi dan jasa lainnya. Efektivitas belanja daerah secara langsung akan tercermin pada kinerja keuangan daerah, yang mengindikasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Selain perbedaan demografi dan potensi sumber daya antardaerah, perhatian juga terfokus pada disparitas fiskal dan ketidakseimbangan kemampuan investasi antardaerah. Dalam Suhendra dkk (2019) dijelaskan ada beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jika kondisi-kondisi ini terus berlanjut, maka berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya memiliki dampak negatif terhadap tingkat kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penentu tingginya tingkat kinerja

keuangan daerah adalah besar kecilnya penerimaan daerah. Selain itu beberapa faktor penentu kinerja keuangan daerah diantaranya adalah belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah (Wahyudin&Hastuti,2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Di Provinsi Lampung, meskipun terdapat potensi sumber daya alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, kinerja keuangan pemerintah daerah masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini terlihat dari rasio efisiensi, ketergantungan, dan kemandirian yang masih di bawah standar ideal. Rasio efisiensi PAD ini dapat dihitung dari total realisasi belanja daerah dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah. Rasio ketergantungan dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan. Sementara Kemandirian keuangan dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan.

Tabel 1. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2023

	Rasio Efisiensi PAD	Rasio Ketergantungan	Rasio Kemandirian
2014	95,83	74,07	7,76
2015	97,29	69,86	7,35
2016	99,05	77,97	7,21
2017	100,62	71,84	8,37
2018	99,48	70,61	8,06
2019	97,75	67,96	9,16
2020	101,2	66,2	9,65
2021	100,99	84,46	10,72
2022	102,78	88,5	10,89
2023	99,19	88,04	11,72

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10 %	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40 %	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, (2010:143)

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma, 2010:77)

Tabel 4. Standar Kemandirian dan Pola Hubungan

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0-25	Rendah Sekali	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim, 2004

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD pada tahun 2014 sampai dengan 2023 menunjukkan lebih dari 90% bahkan pada beberapa tahun melebihi 100% menunjukkan bahwa pengeluaran daerah hampir menyamai atau melampaui pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini mencerminkan ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah, karena setiap peningkatan pendapatan tidak diikuti dengan pengendalian belanja yang proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak efisien sesuai dengan kriteria penilaian efisiensi menurut Mahmudi (2010). Ketidakefisienan tersebut mengindikasikan bahwa struktur belanja daerah belum produktif, di mana sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin (belanja operasi),

khususnya belanja pegawai, dibandingkan belanja yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang seperti belanja modal. Akibatnya, belanja daerah belum mampu menghasilkan *value for money* yang optimal dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah maupun kualitas pelayanan publik. Rasio ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung lebih dari 60% yang artinya pemerintah daerah masih memiliki kriteria tingkat ketergantungan yang sangat tinggi berdasarkan kriteria Bisma (2010). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kapasitas fiskal daerah masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Sementara itu kriteria tingkat kemandirian menurut Halim (2004),

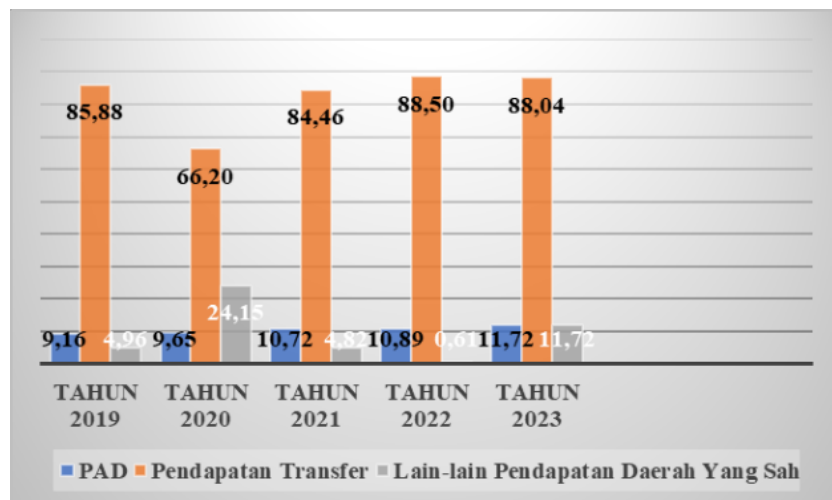
maka tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tergolong dalam kriteria rendah sekali yaitu masih dibawah 15% dengan pola hubungan instruktif. Rendahnya tingkat kemandirian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri, karena sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pola hubungan instruktif mengindikasikan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah, sehingga ruang fiskal dan fleksibilitas daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan menjadi terbatas

Dilihat dari ketiga rasio ini, merupakan bukti nyata yang menunjukkan rendahnya Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Lampung. Rendahnya Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Lampung ini salah satunya diindikasikan karena Belanja Daerah yang kurang efisien dan efektif. Belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, besarnya belanja daerah tidak selalu mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan maupun pengalokasiannya. Pengeluaran daerah cenderung terserap lebih banyak pada belanja operasi terutama belanja pegawai dibanding belanja modal, sehingga berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Belanja pegawai menyerap porsi terbesar anggaran daerah, sehingga tidak ada ruang untuk belanja lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya efisiensi dan optimalisasi dalam pengelolaan anggaran.

Pengalokasian belanja daerah khususnya di Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung, porsi terbesar masih di Belanja Pegawai yaitu sebesar 40,85%, sementara itu untuk belanja modal hanya teralokasi sebesar 11,73%. Dari total belanja modal tersebut, porsi terbesar dialokasikan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sementara belanja modal untuk gedung, peralatan, serta aset produktif lainnya masih tergolong kecil.

Padahal, belanja modal merupakan komponen belanja daerah yang bersifat strategis karena memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kapasitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belanja daerah masih lebih diarahkan untuk mempertahankan operasional pemerintahan dibandingkan dengan upaya memperkuat kapasitas ekonomi daerah dan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang. Selain permasalahan alokasi belanja daerah yang tidak efisien dan efektif, Lampung menghadapi tantangan berupa penggalan potensi PAD yang masih rendah. Berdasarkan informasi dari Radio Lampung Heartline, bahwa meskipun Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi dan demografi yang besar, dengan jumlah penduduk mencapai 9,4 juta jiwa menjadikannya Provinsi terpadat kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) masih tergolong rendah. Selain itu, peningkatan pembangunan belum menjadi jaminan bahwa daerah sudah mandiri secara fiskal, sebab pembiayaan masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan belum sepenuhnya ditopang oleh PAD. Rendahnya PAD ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan visi Lampung Maju serta menjadi kendala utama pembangunan di Lampung.



Gambar 1. Grafik Rasio PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (Data Diolah 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio PAD terhadap Total Pendapatan hanya berada di kisaran 10%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Lampung harus terus meningkatkan berbagai upaya dalam rangka menggali potensi PAD sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan secara mandiri, sementara itu rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan berada di kisaran 60% - 80% atau berada diatas 50% yang berarti tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi sedangkan sisanya terdiri dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Selain rendahnya PAD dan tingginya dana transfer dari pemerintah pusat, disparitas antar daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten/Kota di Lampung. Kabupaten/kota di Lampung memiliki kemampuan fiskal yang sangat bervariasi, sehingga belanja daerah pun timpang.

Pada penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah namun tidak ditemukan penelitian-

penelitian yang menggunakan keseluruhan variabel (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja daerah, dan kinerja keuangan daerah) yang ada pada penelitian ini. Tidak hanya adanya kesamaan antara hasil penelitian tetapi juga ditemukan ketidaksamaan hasil terhadap variabel yang diteliti seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Andrean&Sari (2020) dan Sembel (2018) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2021) dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah tetapi untuk Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amanda (2023) menunjukkan Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari &Trisnarningsih (2022) serta Sari & Halmawati (2021) yang menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah. Melihat dari penelitian terkait variabel Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Kinerja Keuangan juga memperlihatkan adanya perbedaan pada hasil penelitian. Aulia&Sari (2023), Aryasandi&Akbar (2024) menyimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sementara Ramlah dkk (2023), Musrini & Aufa (2024) menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar. Selain itu Aryasandi&Akbar (2024) juga menyimpulkan bahwa pendapatan transfer memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta ditemukan adanya gap riset pada penelitian terdahulu, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan menguji bagaimana pengaruh dari variabel-variabel tersebut, serta diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja dan kemakmuran masyarakat di Lampung. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.”

METODE

Dalam penelitian kali ini, dipergunakan desain penelitian berbasis metode kuantitatif. Dalam penelitian kali ini, peneliti berencana untuk menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan, berupa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai dari tahun 2014-

2023 yang bersumber dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota di Lampung selama periode 2014-2023, yang terdiri dari 15 Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk 13 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber resmi yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi variabel-variabel pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja daerah, dan kinerja keuangan daerah. Data diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan berupa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data yang dikumpulkan mencakup beberapa tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 hingga 2023, dengan unit analisis berupa Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota (atau Provinsi, disesuaikan dengan fokus penelitian). Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengelola, mengklasifikasi, dan menginput data ke dalam tabel agar siap dianalisis menggunakan alat bantu statistik E-Views. Selanjutnya dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki posisi strategis sebagai

gerbang utama Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Secara administratif, Provinsi Lampung terdiri atas 15 daerah otonom, yang terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota. Luas wilayah Provinsi Lampung mencapai sekitar 33.570 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 9,5 juta jiwa (BPS, 2025). Perekonomian Lampung ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa, yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota. Secara umum, struktur pendapatan daerah di Provinsi Lampung terdiri atas tiga komponen utama, yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Hasil Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel

didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Berdasarkan proses seleksi, diperoleh sebanyak 150 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai sampel penelitian.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji-F)

Uji F atau secara simultan dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Uji F ini menguji variabel independent secara simultan atau bersamaan mampu atau tidak menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan baik atau tidak (Ghozali & Ratmono, 2017). Model diterima apabila probabilitas $< 0,05$. Hasil Uji F pada sub struktural 1 dan sub struktural 2 beserta interpretasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Simultan (Uji-F) Sub Struktural 1

Root MSE	1.17E+11	R-squared	0.952308
Mean dependent var	1.35E+12	Adjusted R-squared	0.946571
S.D. dependent var	5.38E+11	S.E. of regression	1.24E+11
Akaike info criterion	54.03829	Sum squared resid	2.06E+24
Schwarz criterion	54.37950	Log likelihood	-4035.872
Hannan-Quinn criter.	54.17691	F-statistic	165.9845
Durbin-Watson stat	0.930295	Prob(F-statistic)	0.000000

Diperoleh hasil bahwa nilai Fhitung sebesar 165,9845 dengan prob $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer

secara bersama berpengaruh terhadap belanja daerah. Selanjutnya dilakukan uji F pada sub struktural 2. Hasil uji ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Uji Simultan (Uji-F) Sub Struktural 2

Root MSE	0.032753	R-squared	0.394924
Mean dependent var	0.994557	Adjusted R-squared	0.316997
S.D. dependent var	0.042247	S.E. of regression	0.034915
Akaike info criterion	-3.759654	Sum squared resid	0.160912
Schwarz criterion	-3.398378	Log likelihood	299.9741
Hannan-Quinn criter.	-3.612879	F-statistic	5.067904

Durbin-Watson stat	1.845537	Prob(F-statistic)	0.000000
--------------------	----------	-------------------	----------

Diperoleh hasil bahwa nilai Fhitung sebesar 5,067904 dengan prob $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah secara bersama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dinyatakan dalam nilai adjusted R-

squared yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Nilai adjusted R-squared yang semakin tinggi serta mendekati nilai 1 menunjukkan kecenderungan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen menjadi semakin baik atau kuat. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) pada sub struktural 1 dan sub struktural 2 beserta interpretasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R²) Sub Struktural 1

Root MSE	1.17E+11	R-squared	0.952308
Mean dependent var	1.35E+12	Adjusted R-squared	0.946571
S.D. dependent var	5.38E+11	S.E. of regression	1.24E+11
Akaike info criterion	54.03829	Sum squared resid	2.06E+24
Schwarz criterion	54.37950	Log likelihood	-4035.872
Hannan-Quinn criter.	54.17691	F-statistic	165.9845
Durbin-Watson stat	0.930295	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R²), maka variabel pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer mampu menjelaskan variabel belanja daerah sebesar 0,946571 atau sebesar 95%, sedangkan sisanya 5%

dijelaskan dengan variabel lain. Selanjutnya dilakukan Uji Koefisien Determinasi (R²) pada sub struktural 2. Hasil uji ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R²) Sub Struktural 2

Root MSE	0.032753	R-squared	0.394924
Mean dependent var	0.994557	Adjusted R-squared	0.316997
S.D. dependent var	0.042247	S.E. of regression	0.034915
Akaike info criterion	-3.759654	Sum squared resid	0.160912
Schwarz criterion	-3.398378	Log likelihood	299.9741
Hannan-Quinn criter.	-3.612879	F-statistic	5.067904
Durbin-Watson stat	1.845537	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R²), maka variabel pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah hanya

mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan sebesar 0,316997 atau sebesar 32%, sedangkan sisanya 68% dijelaskan dengan variabel lain.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial (uji-t) digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Suatu variabel dianggap berpengaruh signifikan apabila nilai

probabilitas (p-value) < 0,05. Dengan demikian, hasil uji-t yang menunjukkan p-value < 0,05 dapat dijadikan acuan dalam menerima atau menolak hipotesis penelitian. Berikut ini merupakan hasil uji t pada sub struktural 1 dan sub struktural 2:

Tabel 9. Uji Parsial (Uji-t) Sub Struktural 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.27E+11	5.68E+10	11.02477	0.0000
X1	1.318182	0.320332	4.115049	0.0001
X2	0.544135	0.069926	7.781617	0.0000

1. Hasil uji t pada variabel X1 di atas menunjukkan nilai $t = 4,115049$ dengan signifikansi 0,0001. Angka ini berada di bawah nilai 0,05, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah (X1) terhadap variabel belanja daerah (Z). Dengan demikian **H1 diterima**.
2. Hasil uji t pada variabel X2 di atas menunjukkan nilai $t = 7,781617$ dengan signifikansi 0,0000. Angka ini berada di bawah nilai 0,05, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan transfer (X2) terhadap variabel belanja daerah (Z). Dengan demikian **H2 diterima**.

Tabel 10. Uji Parsial (Uji-t) Sub Struktural 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.806611	0.022064	36.55724	0.0000
X1	-1.73E-13	9.54E-14	-1.811661	0.0723
X2	-2.46E-14	2.37E-14	-1.038751	0.3008
Z	1.73E-13	2.43E-14	7.128943	0.0000

3. Hasil uji t pada variabel Z di atas menunjukkan nilai $t = 7,128943$ dengan signifikansi 0,0000. Angka ini berada di bawah nilai 0,05, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel belanja daerah (Z) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y). Dengan demikian **H3 diterima**.
4. Hasil uji t pada variabel X1 di atas menunjukkan nilai $t = -1,811661$ dengan signifikansi 0,0723. Angka ini berada di atas nilai 0,05, yang mengindikasikan variabel pendapatan asli daerah (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y). Dengan demikian **H4 ditolak**.
5. Hasil uji t pada variabel X2 di atas menunjukkan nilai $t = -1,038751$ dengan signifikansi 0,3008. Angka ini berada di atas nilai 0,05, yang

mengindikasikan variabel pendapatan transfer (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y). Dengan demikian **H5 ditolak**.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Path analysis dilakukan guna mengevaluasi dampak tidak langsung (indirect effect) dari variabel pendapatan asli daerah (X1) terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y) dengan melalui belanja daerah (Z) sebagai pemediasi dan variabel pendapatan transfer (X2) terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y) dengan melalui belanja daerah (Z). Untuk mengetahui indirect effect, dalam penelitian ini, dilakukan uji Sobel menggunakan kalkulator Sobel test.

Perhitungan uji sobel menggunakan perhitungan Kalkulator Tes Sobel sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan melalui Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a 1.318182	Sobel test: 3.56271937	0	0.00036703
b 1.73E-13	Aroian test: 3.53666381	0	0.00040522
s _a 0.320332	Goodman test: 3.58935942	0	0.00033149
s _b 2.43E-14	Reset all	Calculate	

Berdasarkan hasil perhitungan uji Sobel, diperoleh nilai z Sobel sebesar 3,5627 dengan p-value sebesar 0,000367. Nilai p-value ini jauh lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0,05, yang berarti pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) melalui Belanja Daerah (Z) adalah signifikan. Dengan kata lain, meskipun pengaruh langsung X1 terhadap Y sebelumnya tidak signifikan, keberadaan Z sebagai variabel mediasi mampu menjadikan pengaruh tersebut signifikan secara tidak langsung. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Belanja Daerah

berperan sebagai variabel mediasi pada hubungan X1 terhadap Y. Dengan demikian **H6 Diterima**.

2. Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan melalui Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a 0.544135	Sobel test: 5.25268181	0	1.5e-7
b 1.73E-13	Aroian test: 5.22922972	0	1.7e-7
s _a 0.069926	Goodman test: 5.27645229	0	1.3e-7
s _b 2.43E-14	Reset all	Calculate	

Berdasarkan hasil perhitungan uji Sobel, diperoleh nilai z Sobel sebesar 5,2527 dengan p-value sebesar $1,5 \times 10^{-7}$ (atau 0,00000015). Nilai p-value ini jauh lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0,05, yang berarti pengaruh tidak langsung Pendapatan Transfer (X2) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) melalui Belanja Daerah (Z) adalah signifikan. Dengan demikian, meskipun pengaruh langsung X2 terhadap Y tidak signifikan, keberadaan Belanja Daerah sebagai variabel mediasi mampu membuat jalur pengaruh tidak langsung menjadi signifikan. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Belanja Daerah memediasi hubungan X2 terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara kuat. Dengan demikian **H7 Diterima**.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Pada tabel 4.11 nilai t-Statistic sebesar 4,115049 dengan nilai probability sebesar 0,0001 Angka ini berada di bawah nilai 0,05, yang mengindikasikan adanya

pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah (X1) terhadap variabel belanja daerah (Z). Dengan demikian H1 diterima. Semakin besar kontribusi PAD, semakin leluasa pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

2. Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah. Pada tabel 4.11 nilai t-Statistic sebesar 7,781617 dengan signifikansi 0,0000. Angka ini berada di bawah nilai 0,05, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan transfer (X2) terhadap variabel belanja daerah (Z). Dengan demikian H2 diterima. Transfer pusat berfungsi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai belanja publik. Semakin tinggi dana transfer yang diterima, semakin meningkat pula kemampuan belanja daerah dalam mendanai pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat secara luas.

3. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pada tabel 4.12 nilai t-Statistic sebesar 7,128943 nilai t-Statistic sebesar dengan signifikansi 0,0000. Angka ini berada di bawah nilai 0,05,

yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel Belanja Daerah (Z) terhadap variabel Kinerja Keuangan (Y). Dengan demikian H3 diterima. Belanja daerah yang terarah pada sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbaiki indikator kinerja keuangan.

4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pada Tabel 4.12 diperoleh nilai t-Statistic sebesar -1,811661 dengan nilai probability sebesar 0,0723. Nilai ini lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel PAD (X1) terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y). Dengan demikian, H4 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PAD berperan sebagai indikator kemandirian fiskal, kontribusinya terhadap kinerja keuangan daerah belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh proporsi PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah, sehingga peningkatan PAD belum mampu secara signifikan mendorong perbaikan kinerja keuangan.

5. Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk

menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pada Tabel 4.12 diperoleh nilai t-Statistic sebesar -1,038751 dengan nilai probability sebesar 0,3008. Nilai ini lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Transfer (X2) terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y). Dengan demikian, H5 ditolak. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat dana transfer yang penggunaannya sebagian besar telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran menjadi terbatas. Dengan demikian, besarnya dana transfer tidak otomatis mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah. Dalam praktiknya, tingginya ketergantungan pada transfer justru membuat daerah kurang terdorong untuk menggali sumber pendapatan asli, sehingga kemandirian fiskal dan kualitas kinerja keuangan daerah tetap rendah.

6. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Melalui Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Melalui Belanja Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan uji Sobel, diperoleh nilai z Sobel sebesar 3,5627 dengan p-value sebesar 0,00036703. Nilai p-value ini jauh lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0,05, yang berarti pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (X1)

terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) melalui Belanja Daerah (Z) adalah signifikan. Dengan kata lain, meskipun pengaruh langsung X1 terhadap Y sebelumnya tidak signifikan, keberadaan Z sebagai variabel mediasi mampu menjadikan pengaruh tersebut signifikan secara tidak langsung. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Belanja Daerah berperan sebagai variabel mediasi pada hubungan X1 terhadap Y. Dengan demikian, H6 diterima. Sehingga dapat disimpulkan PAD tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, namun penggunaannya melalui belanja daerah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.

7. Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Melalui Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Melalui Belanja Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan uji Sobel, diperoleh nilai z Sobel sebesar 5,25268181 dengan p-value sebesar $1,5 \times 10^{-7}$ (atau 0,00000015). Nilai p-value ini jauh lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0,05, yang berarti pengaruh tidak langsung Pendapatan Transfer (X2) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) melalui Belanja Daerah (Z) adalah signifikan. Dengan demikian, meskipun pengaruh langsung X2 terhadap Y tidak signifikan, keberadaan Belanja Daerah sebagai variabel mediasi mampu membuat jalur pengaruh tidak langsung menjadi signifikan. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Belanja Daerah memediasi hubungan X2

terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara kuat. Dengan demikian, H7 diterima. Sehingga dapat disimpulkan Pendapatan transfer tidak serta merta mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah jika tidak diikuti dengan pengelolaan yang tepat. Transfer dari pemerintah pusat pada dasarnya bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah, namun manfaatnya baru dapat dirasakan ketika dana tersebut dialokasikan melalui belanja daerah yang produktif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, namun tidak memberikan dampak signifikan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan tidak cukup hanya ditopang oleh peningkatan pendapatan, melainkan sangat bergantung pada efektivitas Belanja Daerah. Temuan ini menegaskan bahwa Belanja Daerah menjadi faktor mediasi utama yang mampu mengoptimalkan pengaruh PAD maupun Pendapatan Transfer terhadap kinerja keuangan. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan dan alokasi belanja yang dilakukan pemerintah daerah, semakin besar pula kontribusi pendapatan daerah terhadap peningkatan kinerja keuangan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah secara lebih profesional. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, Belanja

daerah hendaknya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kinerja keuangan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mengingat pengaruh transfer dari pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan tidak signifikan secara langsung, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan dana transfer, agar tidak hanya menjadi instrumen ketergantungan fiskal tetapi juga mampu meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode waktu penelitian yang lebih panjang atau perbandingan antarprovinsi dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara PAD, pendapatan transfer, belanja daerah, dan kinerja keuangan. Selain itu penggunaan pendekatan kualitatif untuk menggali faktor-faktor non-finansial, seperti kapasitas aparatur, sistem akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Affifah, Riska Afiatul & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018. 4(1): 6.
- Amanda, C.D & Praptoyo, S. (2023). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

- terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 12(5): 1-17.
- Amrozi, A.I. (2016). "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. 1(1).
- Andrean,A & Sari,V.F. (2020). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderasi". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.2(1): 1984-2000.
- Anynda, N.S & Hermanto, S.B. (2020). "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 9(10).
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".UB Press, Malang.
- Aryasandi. F.I & Akbar, F.S. (2024). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 6 (10).
- Aulia, R & Sari, I. (2023). "Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Kinerja Keuangan Pemda dengan Belanja Pegawai sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Riset Akuntansi*. 13 (2): 152-167.
- Azhar, Iqlima. (2021). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa," no. September 2021: 164–74.
- Badjra, I.B., Mustanda, I.K & Abundanti, N. (2017). "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali". *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 6(1): 29-40.
- Christia,A.M.,& Ispriyarso,B. (2019). "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah di Indonesia". *Law Reform*. 15 (1).
- Musgrave, Richard A. 1959. *The Theory of Public Finance*. International Student Edition. Kogakusha: McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B.1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Musrini, Y & Aufa, M. (2024). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kendali Akuntansi*,2(2): 221-236.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permatasari, D.A & Trisnarningsih, S. (2022). "Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3): 1573-1582.
- Sari, B.I & Halmawati. (2021). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan

- Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1) : 1-11.
- Sembel, A.M.A., Rimate, V.A & Rotinsulu, D.C. (2018). “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.19, No.1.
- Suhendra, R., Safri, M & Bhakti, A. (2019). “Kemampuan fiskal daerah dan pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. 8(1): 31-42.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, L.O.A. (2021). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1): 25-41.
- Wahyudin, I & Hastuti. (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat”. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1): 86-97.
- Wahyuni, E. (2018). “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.
- Wiranata, Bagas. (2025). “Peran Regulasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014-2023”. Tesis. Universitas Islam Indonesia.